

### **BAB III**

#### **Hambatan Investasi PLTU di Kabupaten Batang**

Pembangunan PLTU di Kabupaten Batang ini didasari atas penandatanganan perjanjian antara pemerintah Indonesia melalui BUMN-nya yaitu PLN dengan Jepang yang diwakili oleh JBIC (Japan Bank for International Cooperation) pada tanggal 11 Oktober 2011 yang berisikan perjanjian investasi pembangunan PLTU yang berlokasi di Kabupaten Batang, dengan tujuan terpenuhinya kebutuhan listrik untuk daerah Jawa dan Bali. Dan direncanakan selesai pembangunan fisiknya mulai pada tahun 2016.

Tabel Detail Proyek Investasi Jepang di Batang:

Nilai Proyek	US\$ 4 Miliar
Kontrak	Kerjasama Pemerintah – Swasta dengan skema BOOT (Build, own, operate, Transfer)
Tanggal Penandatanganan	11 Oktober 2011
Kapasitas	2 x 1000 Mw
Luas lahan	226 Hektar
Rencana Operasi	2020
Lokasi	Desa Karanggeneng, Roban, Ujung Negro, Wonorekso, dan Ponowareng di Kabupaten Batang

Kontraktor	PT. Bhimeasena Power Indonesia (PT.Adro, Itochu corp, J-Power)
------------	---

Sumber data: <http://www.bhimasenapower.co.id/>

PT. Bhimasena power Indonesia atau biasa disebut BPI merupakan perusahaan join venture antara tiga perusahaan yang berbeda yaitu J-Power dari jepang, itochu dari jepang serta PT Andro power dari Indonesia. Presentase sahamnya adalah dari Electric Power Development Co., Ltd. (J-Power) (34%), PT Adaro Power (34%) dan Itochu Corporation (Itochu) (32%). Adapun PT Adaro Power merupakan anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh PT Adaro Energy Tbk (ADRO).<sup>1</sup> Perusahaan join venture sendiri diartikan sebagai kerjasama antara dua perusahaan atau lebih yang berisikan perusahaan nasional dan perusahaan asing. Join venture sendiri dibentuk untuk membuat suatu perusahaan induk dengan tujuan menguasai pasar demi keuntungan bersama, suatu perusahaan join venture memiliki waktu kerjasama yang pendek, dimana jika sudah tercapai tujuan utama perusahaan tersebut maka join venture bisa dikatakan selesai.<sup>2</sup>

Dalam kaitanya dengan pembangunan PLTU di kabupaten batang ini tentu PT. BPI akan selesai kerjasamanya setelah PLTU selesai di bangun. Sehingga PT BPI memiliki andil besar dalam proses investasi PLTU di kabupaten batang ini. Selain itu proyek ini juga bisa dibilang merupakan proyek yang besar Karena ini merupakan proyek gabungan antara pemerintah Indonesia dengan swasta sebagai

---

<sup>1</sup> PT.BPI, "Skema bisnis dan profil IPP", di akses dari <http://www.bhimasenapower.co.id/content/10/skema-bisnis-dan-profil-ipp/2>, pada tanggal 4 januari 2017, pukul 13.00

<sup>2</sup> Asyhadie, Zaeny. 2006. Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaanya Di Indonesia). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

pemberi dana, dimana selanjutnya setelah kesepakatan kontrak selama 25 tahun habis maka pihak swasta akan memberikan sepenuhnya pengelolaan PLTU Batang kepada pemerintah Indonesia.

Tentunya PT.BPI sebagai perusahaan yang nantinya akan membangun PLTU Batang dengan target 2020 menganggap penting proyek ini, Karena setelah PLTU berjalan maka listrik akan dijual kepada PLN (Persero). Investasi yang banyak itupun nantinya akan terbayarkan Karena keuntungan yang banyak juga akan didapat oleh pihak swasta. Sehingga dalam proses investasi hingga financial closing PT BPI sangat ngotot untuk melanjutkan pembangunan PLTU Karena didukung pemerintah Indonesia walaupun dalam prosesnya banyak hambatan yang terjadi.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Hendra, "Pemerintah tegaskan proyek PLTU tetap jalan", di akses dari <http://industri.kontan.co.id/news/pemerintah-tegaskan-proyek-pltu-batang-tetap-jalan> pada tanggal 5 januari 2017 pada pukul 18.30



#### Detail Lokasi PLTU di Jawa Tengah

PLTU Jawa Tengah nantinya akan menggunakan teknologi terkini ultra-supercritical (USC) yang ramah lingkungan dengan kondisi uap Ultra-super kritikal (USC) dan sistem pengolahan gas buang yang dapat meminimalkan gas emisi/dispersi sehingga ramah lingkungan. Efisiensi panas yang lebih tinggi berarti konsumsi batubara yang lebih rendah dan juga menghasilkan emisi yang lebih rendah.

banyak aktor yang terlibat dalam pembangunan PLTU di kabupaten batang. Aktor – aktor tersebut tidak semuanya mendukung adanya rencana pembangunan PLTU. Dengan berbagai argumen yang dimiliki aktor – aktor tersebut selalu teguh dalam pendiriannya untuk mendukung ataupun tidak mendukung pembangunan PLTU di batang ini. Adapun aktor aktor yang mendukung pembangunan PLTU di kabupaten batang adalah Pemerintah Indonesia, JBIC (Japan Bank for International Cooperation), serta PT. Bhimasena Power Indonesia sebagai kontraktor serta

operator saat PLTU beroperasi. Di sisi lain pihak - pihak yang menentang adanya PLTU ini adalah warga masyarakat sekitar, Greenpeace, serta Walhi.

Investasi pembangunan PLTU batang yang sudah berlangsung sejak tahun 2011 ini pada faktanya menuai banyak hambatan. Hambatan tersebut tidak hanya datang dari pihak internal seperti masyarakat dan organisasi seperti greenpeace melainkan juga datang dari luar yaitu dari parlemen jepang yang menyarankan agar proyek PLTU di Batang yang di danai oleh JBIC (Japan Bank for International Cooperation) ini untuk dibatalkan. Banyak pihak yang meragukan akan keberlangsungan proyek ini di karenakan hambatan – hambatan yang ada dipandang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah Indonesia.

Pada rentan tahun 2011 hingga 2016 hambatan internal dan hambatan eksternal ini silih berganti menghalangi mega proyek ini. Tetapi mengingat ini merupakan proyek yang menjanjikan bagi pihak swasta yaitu investor tentu upaya – upaya akan dilakukan oleh pihak pemerintah Indonesia bersama investor untuk melancarkan proyek ini.

Dalam bagian bab III ini akan dibahas secara rinci hambatan internal serta hambatan eksternal yang terjadi dalam proses investasi pembangunan PLTU di kabupaten Batang yang menyebabkan proses investasi ini berjalan lambat.

## **A. Hambatan Internal**

Suatu proses investasi di negara manapun pastinya sudah di pertimbangkan oleh investor. Sehingga dapat di minimalisir kerugiannya dan dapat menarik untung sebanyak – banyaknya. Begitu pula dalam investasi pembangunan PLTU di kabupaten batang ini. PT. Bhimasena Power Indonesia sebagai kepanjangan tangan dari investor tentu memikirkan hambatan – hambatan yang terjadi terutama hambatan yang terjadi di dalam Indonesia itu sendiri sebelum memutuskan untuk melakukain investasi.

Porses investasi PLTU batang yang sudah berlangsung sejak tahun 2011 ini langsung menghadapi serbuan hambatan yang berasal dari dalam negeri. Hambatan dari dalam negeri ini bisa dibagi menjadi tiga yaitu hambatan dari masyarakat daerah pesisir pantai ujung negoro yang terkena dampak pembangunan PLTU, dari LSM Greenpeace dan dari LSM local Walhi. Dalam skirpsi ini akan dibahas secara mendetail dalam masing – masing bagian.

### **A.1 Masyarakat Sekitar**

Sebuah proyek pembangunan PLTU tentu akan memakan lahan yang tidak sedikit. Seperti halnya pembangunan proyek PLTU di Kabupaten Batang ini, setidaknya proyek besar ini direncanakan mampu untuk membuat daya sebesar 2 x 1000 megawatts ditanah seluas 125.146 meter persegi yang di rencanakan untuk memperlancar suplai listrik di tahun 2020 karena pada tahun tersebut di prediksi Indonesia terutaam jawa akan mengalami krisis listrik.

Lahan seluas itu tentu tidak bisa di dapatkan secara Cuma – Cuma. Pihak PT.BPI dan pemerintah Indonesia harus berhadapan dengan pemilik tanah yaitu masyarakat batang tepatnya di daerah pantai ujung negoro yang meliputi 5 desa yaitu desa Karanggeneng, Roban, Ujung Negoro, Wonorekso, dan Ponowareng. Bukan hanya perkampungan, proyek PLTU ini juga akan menelan tanah persawahan produktif warga, perkebunan melati, dan kawasan konservasi laut daerah (KKLD) dari Ujungnegoro-Roban yang juga tempat menanam terumbu karang.

Warga daerah sekitar proyek PLTU menentang keras adanya pembangunan PLTU ini. Mereka sadar bahwa bahaya yang ditimbulkan oleh PLTU ini akan sangat berbahaya, mulai dari tercemarnya udara sekitar PLTU hingga tercemarnya lingkungan yang akan berdampak pada kelangsungan hidup mereka. Selain itu warga juga merasa tidak mendapat perlakuan yang baik dari pihak pengembang, mulai dari kekerasan oleh pihak pengamanan dari pengembang hingga kesepakatan harga jual tanah yang tidak kunjung menemui titik temu.

Tidak dapat dipungkiri bahwa yang terkena dampak pertama kali dalam pembangunan PLTU batang ini adalah masyarakat yang tinggal di tempat proyek investasi di jalankan. Sebagai masyarakat yang sudah tinggal di tempat tersebut dari generasi ke generasi tentu mereka tidak akan senang jika tempat tinggal yang di huninya akan dipindah secara paksa walaupun dengan ganti rugi yang sepadan.

Dalam proyek pembangunan PLTU di kabupaten Batang ini hambatan pertama yang dihadapi oleh investor dan pemerintah Indonesia adalah masyarakat

yang terkena dampak pembangunan. Dalam hal ini masyarakat terkena dampak proyek tidak mau menerima dana ganti rugi yang diberikan pemerintah yaitu sebesar 120rb perimeter persegi padahal harga tanah di wilayah tersebut hanya sekitar 50ribu per meter persegi. Masyarakat menuntut jikalau pun dilakukan ganti rugi maka masyarakat meminta 4000 kali lipat dari harga tanah yang sewajarnya serta meminta direlokasi di lokasi yang baik.

Masyarakat batang juga sangat mengandalkan hasil laut untuk kehidupan sehari – hari. Tercatat sekitar 101.814 warga batang menggantungkan hidupnya dari sektor kelautan.<sup>4</sup> Dengan adanya PLTU yang akan di bangun ini tentu akan mengakibatkan limbah hasil pembangunan akan mengotori lautan dan tentu akan merusak biota serta keanekaragaman di laut utara jawa itu sendiri. Dengan alasan alasan itulah masyarakat batang menolak dengan keras pembangunan PLTU batang ini. Dengan penolakan dari masyarakat sekitar ini tentu pemerintah yang bekerja dengan swasta harus memutar otak untuk menangani hambatan – hambatan yang ada di lapangan ini.

Menurut sudut pandang pemerintah seharusnya pembebasan lahan seperti ini bukanlah sebuah hambatan jika masyarakat mau bekerja sama. Dalam hal ini jika masyarakat kabupaten batang atau tepatnya masyarakat desa yang terkena dampak proyek mau merelakan tanahnya tentu segalanya akan berjalan secara lancar. Tetapi pada faktanya masyarakat menentang dengan alasan PLTU tersebut tidak aman untuk masa depan anak cucu mereka, padahal PLTU ini saat berjalan nanti akan

---

<sup>4</sup> Jika PLTU raksasa tetap di bangun. Diakses pada laman,  
<<http://www.antarane.ws.com/berita/302289/jika-pltu-raksasa-itu-tetap-dibangun>>



menggunakan teknologi ultra critical system dari Jerman dimana ini akan menghasilkan sedikit emisi dan sedikit limbah untuk dibuang. Karena sistemnya yang sangat efisien.

Terlebih lagi ganti rugi yang diberikan pemerintah dengan swasta sudah lebih dari harga tanah pada umumnya di daerah itu. Menurut pemerintah Indonesia alasan yang dilontarkan masyarakat sekitar tidaklah relevan. Karena semua alasan tersebut sudah diantisipasi dengan pemberian ganti rugi yang cukup besar kepada pemilik tanah. Hambatan lain dari masyarakat tentunya dengan mengadakan demo – demo di Batang maupun Jakarta membuat kesan bahwa proyek yang tujuannya baik yaitu untuk kesejahteraan di masa depan ini menjadi jelek citranya di mata masyarakat Indonesia secara umum. Karena mendiskreditkan masyarakat sekitar.

Jika masyarakat Batang menolak adanya investasi ini berarti juga menolak kedatangan investasi sebesar 40 triliun serta terbukanya 5000 lapangan kerja baru untuk masyarakat kabupaten Batang. Meskipun nanti proyek ini dikelola swasta pada 25 tahun setelah dibangun tetapi hal yang sangat bermanfaat lain yaitu terbukanya lapangan kerja akan langsung berdampak pada masyarakat kabupaten Batang itu sendiri. Serta tentu menjadi terpenuhinya kebutuhan listrik di area Jawa dan Bali.

Solusi – solusi dari pemerintah Indonesia sendiri akan dibahas nanti pada BAB IV bersamaan dengan menggunakan konsep – konsep yang ada hubungannya dengan hubungan internasional yang telah juga sedikit dibahas pada bab I di atas.

## A.2 Greenpeace

Greenpeace merupakan organisasi yang bermula dari sekelompok orang yang memprotes pengujian nuklir di lepas pantai barat Alaska. Setelah itu mereka memutuskan untuk membuat organisasi yang berkonsentrasi di dalam hal lingkungan.<sup>5</sup> Lambat laun Karena globalisasi, greenpeace tentu menyebar ke seluruh dunia, melakukan kampanye – kampanye melawan para perusak lingkungan dengan berbagai macam cara. Seperti membentuk tulisan – tulisan yang ukurannya sangat besar.

Greenpeace sangat berkonsentrasi di wilayah Asia Tenggara. Hal ini di sebabkan Karena Asia Tenggara sangat berarti bagi masa depan kelestarian planet bumi. Selain kekayaan alam yang sangat banyak asia tenggara juga merupakan salah satu paru – paru dunia yang harus dijaga kelestariannya.<sup>6</sup> Musuh greenpeace di wilayah ini sudah sangat jelas yaitu pembangunan infrastruktur ekonomi yang dapat mengancam kondisi alam sekitar. Selain itu greenpeace juga beranggapan bahwa kesadaran masyarakat asia tenggara dalam hal lingkungan masih sangat rendah, hal ini lah yang membuat greenpeace terus berkembang untuk berkampanye di asia tenggara termasuk di Indonesia dengan semangat menumpas industrialisme yang dapat mengancam keberadaan lingkungan.

---

<sup>5</sup> Greenpeace, "Our Story", di akses dari <http://www.greenpeace.org/international/en/about/our-story/>, pada tanggal 6 januari 2017 pada pukul 15.00

<sup>6</sup> Greenpeace, "Greenpeace di asia tenggara", di akses dari <http://www.greenpeace.org/seasia/id/about/> , pada tanggal 6 januari 2017 pukul 15.15

Di Indonesia Greenpeace selalu menyuarakan agar pembangunan sebuah negara jangan sampai mengorbankan lingkungan serta masyarakat. Harus terjadi keseimbangan serta kesinambungan antara pembangunan nasional dengan keberadaan lingkungan alam sehingga lingkungan dapat dilindungi demi keberlangsungan hidup generasi mendatang. Dengan semangat inilah greenpeace melakukan kampanye – kampanye. Dalam studi kasus pembangunan PLTU batang tentu greenpeace akan turun tangan Karena pembangunan PLTU ini sangat bersinggungan dengan alam.

Sejak di tanda tangainya perjanjian investasi pembangunan PLTU pada tahun 2011 antara Indonesia melalui PLN dengan PT BPI greenpeace terang - terangan menentang adanya pembangunan ini. Dalam tulisanya greenpeace memprediksi jika PLTU sudah berjalan akan memproduksi polusi karbon sebanyak 10,8 juta ton per tahun karena batubara merupakan bahanbakar fosil terkotor, selain menjadi penyumbang utama emisi karbon penyebab perubahan iklim, dan tentunya itu akan mengakibatkan degradasi lingkungan sekitar.<sup>7</sup> PLTU Batang disebut-sebut akan menggunakan teknologi terbaru dan pertama kali diterapkan Indonesia, yakni teknologi USC (Ultra Super Critical), selain akan menggunakan peralatan ramah lingkungan seperti penangkap sulfur (FGD) filter debu. Sejumlah pihak tidak setuju dengan klaim ini, diantaranya Greenpeace. Teknologi yang disebut Clean Coal Technology itu disebut Greenpeace hanya untuk efisiensi produksi PLTU. Emisi

---

<sup>7</sup> Tim Peneliti Harvard University, "Laporan ancaman PLTU Batubara", dalam laporan greenpeace Indonesia, 2015 hlm 2

yang dikeluarkan mungkin berkurang, namun tak menghindarkan tersebarnya emisi PLTU seperti SO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub>, dan merkuri.

Pembangunan bertujuan untuk memajukan suatu wilayah atau negara. Pembangunan juga ditujukan untuk kebaikan masyarakat sekitar, begitu pula pembangunan PLTU di kabupaten Batang ini, tentu dengan tujuan inti untuk memajukan Batang serta negara Indonesia pada umumnya. Pembangunan dapat pula di kategorikan dengan beberapa macam yaitu pembangunan manusia dan pembangunan infrastruktur. Pembangunan manusia dampak dari pembangunannya akan berimbas kepada manusia sebagai objeknya dan tidak mempengaruhi lingkungan secara langsung. Tetapi pembangunan infrastruktur pemerintah langsung berhadapan dengan lingkungan yang sebagai sarana pembangunan. Dan tentu ada pihak yang selalu membela lingkungan yaitu greenpeace.

Greenpeace beranggapan bahwa dengan adanya pembangunan PLTU di kabupaten Batang ini sama sekali tidak berpihak pada lingkungan sekitar. Dalam tulisannya greenpeace memprediksi jika PLTU sudah berjalan akan memproduksi polusi karbon sebanyak 10,8 juta ton per tahun karena batubara merupakan bahanbakar fosil terkotor, selain menjadi penyumbang utama emisi karbon penyebab perubahan iklim, dan tentunya itu akan mengakibatkan degradasi lingkungan sekitar.<sup>8</sup> PLTU Batang disebut-sebut akan menggunakan teknologi terbaru dan pertama kali diterapkan Indonesia, yakni teknologi USC (Ultra Super Critical), selain akan menggunakan peralatan ramah lingkungan seperti penangkap

---

<sup>8</sup> Tim Peneliti Harvard University, "Laporan ancaman PLTU Batubara", dalam laporan greenpeace Indonesia, 2015 hlm 2

sulfur (FGD) filter debu. Sejumlah pihak tidak setuju dengan klaim ini, diantaranya Greenpeace. Teknologi yang disebut Clean Coal Technology itu disebut Greenpeace hanya untuk efisiensi produksi PLTU. Emisi yang dikeluarkan mungkin berkurang, namun tak menghindarkan tersebarnya emisi PLTU seperti SO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub>, dan merkuri.

Greenpeace beranggapan bahwa pembangunan PLTU di masa modern sudah tidak masuk akal. Karena masih banyak sumber energi lain yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Selain itu adanya pembangunan PLTU ini juga di anggap greenpeace menjadi malapetaka bagi masyarakat dan lingkungan sekitar mengingat lingkungan pantai ujung negoro yang terkena dampak tersebut masih masuk dalam kawasan konservasi yang tidak boleh di rusak ataupun di ganggu pembangunan yang dapat merusak ara tersebut. Menurut greenpeace pemerintah Jepang dan Indonesia harus membatalkan investasi mereka dalam pembangunan PLTU Batang, karena investasi mereka telah terbukti menimbulkan banyak permasalahan di tengah masyarakat, mulai dari pelanggaran HAM, pengusurhan lahan, dan kriminalisasi terhadap warga, investasi Jepang untuk PLTU Batang juga berpotensi akan memiskinkan warga sekitar. Pemerintah Jepang tidak punya pilihan lain, selain hengkang dari proyek jahat ini

Pemerintah Indonesia tentu memandang greenpeace sebagai organisasi lingkungan ini adalah sebuah hambatan investasi. Dimana dengan adanya greenpeace ini memperkuat posisi masyarakat sekitar sebagai pihak yang selama ini terkesan dirugikan, terlebih lagi dengan jaringan internasional greenpeace yang sangat luas yang membantu mencari dukungan. Jika pemerintah ingin proyek

pembangunan PLTU ini berjalan tentu hambatan semacam ini harus di selesaikan, tetapi memang pada faktanya hambatan seperti inilah yang sangat sulit di lewati. Karena ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak ditambah dengan LSM yang memang punya kemampuan organisir yang baik seperti greenpeace.

Hambatan pembangunan PLTU di Batang ini dilakukan greenpeace dengan berbagai macam cara. Mulai dari melakukan demo bersama masyarakat batang di pemerintah daerah sampai pemerintah pusat, melakukan koreo yang menggambarkan betapa tersiksanya masyarakat batang jika pembangunan PLTU ini terus berlanjut, hingga melayangka objection letter kepada investor utama pembangunan PLTU batang ini yaitu JBIC (Japan Bank for International Cooperation) yang berisikan tentang penyimpangan penyimpangan dalam impelentasi investasi yang dilakukan di lapangan yang bertentangan juga dengan guideline JBIC mengenai isu sosial dan isu lingkungan.

### **A.3 WALHI**

Walhi atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia merupakan sebuah NGO yang beroperasi di bidang lingkungan. Walhi didirikan pada 15 Oktober 1980 sebagai reaksi dan keprihatinan atas ketidakadilan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan sumber-sumber kehidupan, sebagai akibat dari paradigma dan proses pembangunan yang tidak memihak keberlanjutan dan keadilan pada lingkungan.<sup>9</sup> Pada gilirannya krisis lingkungan hidup secara langsung mengancam kenyamanan dan meningkatkan kerentanan kehidupan setiap warga negara. Kerusakan

---

<sup>9</sup> WALHI, "Sejarah" di akses dari <http://www.walhi.or.id/sejarah/>, pada tanggal 10 januari 2017 pada pukul 15.00

lingkungan hidup telah hadir di perumahan, seperti kelangkaan air bersih, pencemaran air dan udara, banjir dan kekeringan yang di akibatkan pembangunan yang tidak memihak kepada keberlangsungan.

Dalam rencana pembangunan PLTU kabupaten Batang tentu Walhi menentang keras dibangunnya PLTU tersebut. Dari sisi lingkungan menurut walhi PLTU Batang akan menghasilkan limbah dan polusi udara yang dapat merusak tatanan daerah sekitar, hal yang akan paling merasakan dampaknya adalah keanekaragaman hayati yang ada di pantai utara jawa akan sangat terancam.<sup>10</sup> Selain itu kehidupan manusia di sekitar pembangunan PLTU tersebut juga akan terganggu, dimulai dari pencemaran udara yang dapat mengakibatkan masyarakat sekitar terkena ispa hingga dapat membunuh Karena polusi udara PLTU akan mengandung zat berbahaya seperti karbon monoksida, hingga dapat menimbulkan kemiskinan dikarenakan kegiatan nelayan pasti akan terganggu Karena ikan – ikan tangkapan akan mati terbunuh oleh limbah yang di hasilkan oleh PLTU Batang nantinya.

Walhi menyatakan bahwa pembuatan PLTU di kabupaten Batang ini tidak masuk akal, Karena menurut data walhi listrik di pulau jawa masih surplus 31%.<sup>11</sup> Jika di bangun di luar pulau jawa seperti sumatera atau kalimantan tentu akan lebih bermanfaat Karena daerah tersebut masih membutuhkan lebih banyak pasokan listrik. Hal ini juga bertentangan dengan pemerataan pembangunan Karena pembangunan tidak seharusnya berpusat hanya di pulau jawa saja, tetapi harus

---

<sup>10</sup> Moh Nadlir, "Walhii peringatkan bahaya PLTU batang", di akses dari <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/757811-walhi-ingatkan-dampak-berbahaya-pltu-batang>, pada tanggal 10 januari 2017 pukul 19.00

<sup>11</sup> Ibid

merambah ke tempat lain pula terutama daerah pinggiran dan perbatasan negara Indonesia.

Ditinjau dari segi bisnis pembangunan PLTU di pulau jawa terlebih lagi di jawa tengah hanya akan menguntungkan perusahaan. Hal ini di sebabkan Karena pasar energi di pulau jawa memiliki harga yang lebih mahal sehingga akan menguntungkan pihak swasta. Selain itu proyek ini juga akan menguntungkan pengusaha batubara, Karena sejak tahun 2013 pasar batubara terus menurun, eksporpun terus menurun Karena kesadaran dunia akan bahaya dari batubara. Sementara proyek ini dicurigai walhi juga untuk menyelamatkan bisnis batubara tersebut agar pasarnya dapat bertahan dan memberikan keuntungan bagi pengusaha batubara.

Sebagai organisasi asli Indonesia yang memperjuangkan hak – hak lingkungan tentunya Walhi merespon adanya pembangunan PLTU di kabupaten batang ini. Walhi beranggapan bahwa pembangunan PLTU batang ini hanya akan menyengsarakan masyarakat sekitar proyek PLTU Karena efek samping negatifnya lebih banyak daripada efek positifnya. Contohnya saja efek bagi lingkungan tentu akan membuat pantai di wilayah ujung negoro akan tercemar Karena buangan limbah dari pltu, belum lagi adanya efek jangka panjang lain seperti pencemaran udara yang membahayakan kesehatan di sekitar PLTU.

Walhi beranggapan bahawa pemaungan PLTU di Batang ini syarat akan muatan politik. Selain dituding hanya akan menguntungkan pihak investor atau swasta, proyek ini juga memperlihatkan ketidak konsistenan presiden SBY dan Joko Widodo yang sama – sama pernah berkomitmen untuk mengurangi dampak



perubahan iklim.<sup>12</sup> Di tambah lagi dampak – dampak tambahan seperti pengangkutan batu bara yang akan melewati rumah penduduk yang mengakibatkan debu – debu dari batu bara akan berhamburan dan merusak kesehatan penduduk sekitar.

Pemerintah Indonesia tentu menganggap serius hal ini. Ditambah masyarakat dan dibantu walhi mengajukan kasasi ke PTUN perihal penolakan adanya proyek PLTU di kabupaten Batang. Walhi juga memfasilitasi masyarakat batang yang ingin berdemo di Jakarta, sehingga ini tentu akan menghambat pembangunan PLTU batang, bukan demonya tetapi efek yang di dapat dari demo tersebut yaitu perhatian masyarakat luas yang ikut menganggap bahwa proyek investasi ini hanyalah untuk kepentingan politis saja.

## **B. Hambatan Eksternal**

Sebuah investasi luar negeri akan melibatkan dua kepentingan, kepentingan negara yang melakukan investasi serta negara yang mendapatkan investasi. Secara normal negara penginvest ingin investasi berjalan cepat agar bisa segera didapatkan hasilnya, begitu pula negara penerima investasi ingin memberikan kemudahan – kemudahan investasi agar investasi berjalan cepat pula. Tetapi hal ideal tersebut sangat jarang terjadi Karena tanpa disadari yang memiliki kepentingan bukan hanya kedua belah pihak tersebut tetapi juga pihak – pihak lain seperti masyarakat, organisasi yang peduli akan investasi tersebut.

---

<sup>12</sup> WALHI peringatkan dampak berbahaya dari PLTU Batang, di akses pada laman, <<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/757811-walhi-ingatkan-dampak-berbahaya-pltu-batang>>

Dalam investasi pembangunan PLTU batang ini hambatan – hambatan investasi tidak hanya berasal dari internal Indonesia saja tetapi juga berasal dari luar seperti dari pemerintah jepang sendiri yang sempat meragukan dan ingin membatalkan investasi tersebut. Maka dari itu berikut hambatan dari luar yang menghambat investasi pembangunan PLTU di kabupaten Batang ini.

### **B.1 Parlemen Jepang**

Proses investasi tidak hanya bergantung pada unsur – unsur yang ada di daerah target investasi, tetapi juga tergantung dari investor dan pihak – pihak yang bisa mengintervensi atau menekan investor itu sendiri. Sama seperti halnya pembangunan PLTU di kabupaten Batang ini, ternyata investor pun bisa menjadi hambatan investasi itu sendiri.

Hal ini berumula dari laporan dari greenpeace dan beberapa organisasi, memberi masukan kepada perdana menteri jepang Sinzo Abe dan parlemen untuk mengkaji ulang proyek pembangunan PLTU terbesar di asia tenggara ini. Komisi HAM Indonesia menyatakan bahwa dengan adanya proyek ini telah terjadi pelanggaran ham dimana – mana.<sup>13</sup> masyarakat dipaksa patuh kepada pemerintah, tidak bisa masuk ke tanahnya sendiri hingga mendapatkan perlakuan kasar dari pasukan pengamanan proyek di lapangan, hal ini sangat bertentangan dengan ham sehingga proyek ini pun harus di tinjau ulang.

---

<sup>13</sup> Indonesian Rights tells japan to review powerplant project, diakses dari laman, <<http://www.japantimes.co.jp/news/2016/01/09/national/indonesian-rights-commission-tells-japan-review-power-project/#.WLThi-KGPcc>>

Parlemen Jepang pun secara tidak resmi mengajukan usulan untuk di berhentikannya proyek PLTU Batang ini Karena dianggap telah melenceng dari guide yang dibuat JBIC yaitu investasi tidak boleh melanggar HAM dan aturan – aturan yang sudah ada. Usulan ini di prakarsai oleh Mizuho salah satu anggota parlemen Jepang, Mizuho beranggapan PLTU yang pengoperasiannya memakai batu bara akan menyisakan limbah yang sangat buruk pengaruhnya bagi lingkungan sekitar Batang. Karena itu, dia mendesak pemerintah Jepang dan juga beberapa lembaga pemodal lain untuk menghentikan proyek itu.<sup>14</sup> Menanggapi hal ini, Hirofumi Oishi, Director Press and External Affairs Division JBIC; dan Kazunori Ogawa, Deputy Director Power and Water Finance Department JBIC, menyatakan akan mempertimbangan suara masyarakat, pemerintah Indonesia, dan perusahaan, sebelum memutuskan apakah meneruskan atau membatalkan rencana pendanaan bakal PLTU terbesar di Asia Tenggara itu.

---

<sup>14</sup> Parlemen Jepang minta proyek PLTU Batang dibatalkan, diakses dari laman, <https://m.tempo.co/read/news/2014/09/13/078606638/parlemen-jepang-minta-proyek-pltu-batang-dibatalkan>